



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2006 Tentang Desa menjadikan definisi Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia . Pada dasarnya kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diarahkan untuk menjalankan fungsi Pemerintahan yang hakiki yakni memberikan pelayanan masyarakat guna mewujudkan rasa keadilan, melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kemandirian.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa senantiasa dilandasi prinsip kemitrasejajaran hubungan antara Perbekel dan BPD sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, maka sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintahan kepada Bupati, BPD dan masyarakat, Pemerintah Desa berkewajiban untuk menyampaikan laporan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan kepada BPD dan menyusun Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 35 th.2007 tentang Pedoman Umum tata cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.



B. TUJUAN PENYUSUNAN PELAPORAN

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah ditegaskan dalam Asas Pengelolaan Keuangan Desa yaitu ASAS AKUNTABEL. Hakikat dari Pelaporan ini adalah agar Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek yaitu Hukum, Administrasi maupun secara Moral. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa adalah merupakan kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dan Pelaporan ini sebagai salah satu alat pengendalian untuk :

1. Mengetahui Kemajuan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang direncanakan Pemerintahan Desa
2. Mengevaluasi berbagai Aspek, seperti hambatan, permasalahan yang dihadapi, Upaya penanganan solusinya, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan dan sebagainya terkait pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Desa

C. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN SEMENGGAT KEBERSAMAAN MEMBANGUN DESA BENGKEL YANG “ **D A M A I** “

{ **DEDIKASI, AKUNTABEL, MANDIRI, AMAN, INTEGRITAS** }

Makna Visi :

Damai mengandung makna terpenuhinya kebutuhan dasar berupa sandang, pangan dan papan masyarakat

D = DEDIKASI

Mengandung makna; pengorbanan/pengabdian yang tulus ikhlas dalam membangun desa.

A = AKUNTABEL

Mengandung makna; bisa mempertanggung jawabkan segala perbuatan, perkataan dan pemikiran secara sekalanya kepada masyarakat dan niscaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

M = MANDIRI

Mengandung makna mampu memberikan keputusan yang positif dan tepat serta bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

A = AMAN

Mengandung makna; mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat



I = INTEGRITAS

Mengandung makna; memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat serta konsisten.

Untuk mewujudkan Visi selama enam tahun kedepan agar dapat di capai, tentunya dengan rumusan – rumusan Misi yaitu :

1. Memberikan PELAYANAN yang optimal/prima kepada seluruh masyarakat desa
2. Pembangunan Infrastruktur desa berupa jalan lingkungan desa dan asset desa lainnya.
3. Memberi reward/penghargaan kepada siswa yang berprestasi.
4. Memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.
5. Mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
6. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) desa.
7. Pemberdayaan kekeluargaan, Pemuda, Olahraga dan Seni.

1. Di bidang Pelayanan :

- Memberikan pelayanan yang Optimal / Prima kepada seluruh masyarakat Desa Bengkel dengan “ MOTTO “
 - ❖ Kalau bisa dipercepat kenapa diperlambat.
 - ❖ Kalau gratis kenapa harus bayar.
 - ❖ Kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit.
- Semua jenis pelayanan mengacu dengan “ SOP “ (Standar Operasional Prosedur) yang menyangkut tentang :
 - ❖ Kelengkapan Persyaratan Administrasi.
 - ❖ Lamanya waktu Pengurusan Administrasi.
 - ❖ Ada dan tidaknya Biaya yang dibutuhkan dalam Proses pengurusan Administrasi . DLL.
- Tertib administrasi kependudukan dengan jemput bola, untuk itu perlu pengembangan kewilayahan dengan penambahan / pemekaran Banjar Dinas.
- Memberikan informasi yang seluas – luasnya lewat media social (MEDSOS) atau WEB Pemerintah Desa Bengkel serta melalui Sangkepan Desa maupun Banjar terkait dengan informasi yang harus diterima oleh Masyarakat khususnya tentang Dana Yang dikelola oleh Desa sesuai APBDesa mulai dari :
 - ❖ Perencanaan Anggaran.
 - ❖ Pelaksanaan Kegiatan.
 - ❖ Pelaporan dan Pertanggung jawaban Kegiatan secara transparan dan Akuntabel.

2. Di Bidang Pembangunan :

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan :
- ❖ Pembangunan Infrastruktur seperti Jalan Lingkungan / jalan Desa dan Aset Desa lainnya.
 - Pembangunan di bidang Pendidikan :



- ❖ Memberikan Reward / Penghargaan kepala siswa yang berprestasi
 - ❖ Mengusulkan Sekolah Taman Kanak – Kanak (PAUD) Desa agar menjadi TK Negeri.
 - ❖ Memediasi permasalahan – permasalahan sekolah yang ada di Desa dengan Dinas/ pihak terkait serta mencari Solusinya.
 - Pembangunan di bidang Kesehatan.
 - ❖ Memberikan Penyuluhan Kesehatan kepada Masyarakat.
 - ❖ Meningkatkan pelayanan kesehatan yang selama ini sudah berjalan dengan baik melalui Pos Pelayanan Kesehatan yang ada.
 - ❖ Mengupayakan agar semua masyarakat mendapatkan Fasilitas Kesehatan berupa KIS (Kartu Indonesia Sehat). Dll
 - Pembangunan di Bidang Ekonomi
 - ❖ Mengoptimalkan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dengan cara pengembangan unit – unit usaha lainnya seperti :
 - ✓ Unit Usaha Air Minum Pedesaan.
 - ✓ Unit Usaha Pasar Desa.
 - ✓ Unit Usaha Ternak secara berkelompok.
 - ✓ Unit Usaha Kerajinan.
 - ✓ Unit usaha Pertanian
 - ✓ Unit Usaha Pengelolaan Sampah.
 - ✓ Unit Usaha Wisata Desa, serta unit usaha lainnya sesuai potensi yang ada di Desa.
 - Pembangunan di bidang Sumber daya Manusia (SDM)
 - ❖ Pembinaan dan Pelatihan kepada Perangkat Desa.
 - ❖ Pembinaan dan Pelatihan Pengurus Lembaga – lembaga yang ada di desa.
 - ❖ Pembinaan dan Pelatihan kepada kader – kader kesehatan yang ada di desa.
 - ❖ Pelatihan ketrampilan kepada masyarakat sesuai potensi desa yang dimiliki. Dll.
3. Di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
- Meningkatkan Partisipasi Gotong – royong masyarakat.
 - Meningkatkan sisial budaya masyarakat.
 - Menigkatkan ketakwaan beragama dan Spiritual masyarakat. Dll
4. Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Memotivasi masyarakat melalui Sosialisasi akan pentingnya arti Budaya, Politik, Ekonomi serta Lingkungan Hidup
 - Perberdayaan Kelompok kelompok, Pemuda (STT dan Karang Taruna) Sanggar seni.
 - Pengembangan Olag raga sesuai potensi desa, dll.



D. STRATEGI KEBIJAKAN

Hasil analisa oleh Tim Perumus bersama Pemerintah Desa, Kelembagaan Desa, serta Masyarakat Desa Bengkel pada umumnya telah menghasilkan rumusan yang mana rumusan tersebut didapat dari hasil pengkajian Desa dimulai dari menjangring Aspirasi Masyarakat mulai dari tingkat Masyarakat terendah seperti Buruh, Petani, Sampai pada tingkat paling atas yaitu hasil identifikasi dan sinkronisasi dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng serta Penjabaran Visi Misi Desa.

Dari hasil pengkajian Desa tersebut didapatkanlah masalah utama atau isu strategis dalam Pelaksanaan Pembangunan yang dilakukan oleh Desa Bengkel adalah sebagai berikut :

1. Belum memadainya Sarana Prasarana Desa seperti Inprastruktur Jalan, Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, dan komunikasi.
2. Keberadaan Kelompok-kelompok yang ada belum ditata dengan baik dan belum menyadari arti dan makna berkelompok.
3. Masih rendahnya Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa
4. Masih rendahnya Kapasitas Kelembagaan yang ada di Desa
5. Kurangnya Fasilitas Akses Informasi Desa berbasis Teknologi
6. Terbatasnya Pembinaan Generasi Muda Desa
7. Masih sangat rendahnya tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Desa
8. Kesejahteraan Masyarakat Desa masih rendah
9. Pemanfaatan Irigasi belum maksimal
10. Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa



BAB II

PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA DAN PELAKSANNANYA

A. PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :

1. Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Kegiatan Operasional Perkantoran
5. Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD
6. Kegiatan Operasional BPD
7. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
8. Penyusunan Profil Desa
9. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
10. Pemetaan dan Analisi Kemiskinan Secara Partisipatif
11. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
12. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa lainnya
13. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes)
14. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
15. Penyusunan Laporan Kepala Desa
16. Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa

Pelaksanaan dari Rencana Program Penyelenggaraan Pemerintah Desa dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Kegiatan Operasional Perkantoran
5. Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD
6. Kegiatan Operasional BPD
7. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
8. Penyusunan Profil Desa
9. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
10. Pemetaan dan Analisi Kemiskinan Secara Partisipatif



11. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
12. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa lainnya
13. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes)
14. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
15. Penyusunan Laporan Kepala Desa
16. Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa

B. PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBANGUNAN

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) Paud
3. Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu
4. Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
6. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan
7. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa
9. Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman

Pelaksanaan dari Rencana Program Pembangunan dimaksud berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) Paud
3. Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu
4. Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
6. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan
7. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa
9. Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman



C. PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :

1. Kegiatan Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)
2. Kegiatan Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3. Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (Perayaan Hari Kemerdekaan, hari Besar Keagamaan)
4. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah adat/Kebudayaan Milik Desa
5. Pembinaan Lembaga Adat
6. Kegiatan Pembinaan PKK

Pelaksanaan dari Rencana Program Pembinaan Kemasyarakatan dimaksud berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :

1. Kegiatan Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)
2. Kegiatan Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3. Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (Perayaan Hari Kemerdekaan, hari Besar Keagamaan)
4. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah adat/Kebudayaan Milik Desa
5. Pembinaan Lembaga Adat
6. Kegiatan Pembinaan PKK

D. PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :



1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
3. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios Milik Desa

Pelaksanaan dari Rencana Program Pemberdayaan Masyarakat dimaksud berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
3. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios Milik Desa



BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Bengkel Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah ke Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 3 Nopember 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

B. PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Peraturan Desa Bengkel Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Format C.



C. RINCIAN REALISI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA



BAB IV

KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	UPAYA YANG DITEMPUH
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none">- Pengelolaan dan Penatausahaan Administrasi Desa- Sarana dan Prasarana Kantor semakin memadai	<ul style="list-style-type: none">- Kurangnya Pengetahuan Perangkat Desa- Belum terlaksananya Pendataan Data Dasar Keluarga	<ul style="list-style-type: none">- Perlu diadakan Pelatihan untuk Perangkat Desa- Diperlukan Ketua-Ketua Kelompok yang ada di Desa untuk melakukan Pendataan
2	Pembangunan Desa	<ul style="list-style-type: none">- Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan- Terlaksananya Pembangunan Jalan Usaha Tani- Terlaksananya Pembangunan Pahrayangan Desa	<ul style="list-style-type: none">- Permasalahan Harga Material Yang Tidak Stabil Menghambat Pembangunan- Permasalahan Harga Material Yang Tidak Stabil Menghambat Pembangunan	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan Survey Harga Barang lebih dari satu toko- Melakukan Survey Harga Barang lebih dari satu toko



3	Pembinaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">- Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan Linmas sudah mulai memadai- Terlaksananya Pembinaan Kesenian Gong Kebyar Wanita PKK Desa sehingga budaya kesenian Bali semakin dicintai- Semakin meningkatnya prestasi Olah Raga bidang Bulutangkis	<ul style="list-style-type: none">- Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga keamanan lingkungan belum maksimal- Kurangnya sarana dan prasarana Perangkat Gamelan- Kurangnya Sarana dan Prasarana Olah Raga	<ul style="list-style-type: none">- Mengupayakan adanya Poskamling di masing-masing Banjar untuk tetap menjaga keamanan Desa- Mengupayakan bantuan perangkat gambelan Gong- Membangun sarana prasarana olahraga



4	Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksanannya Pelatihan Bumdes			
---	-------------------------	---------------------------------	--	--	--



BAB V

P E N U T U P

A. KESIMPULAN LAPORAN

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah bagian terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa, maka kami menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan sebagaimana terurai dalam Laporan ini sebagai berikut :

1. Perbekel menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir Tahun Anggaran 2020 kepada Bupati Melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2020.
2. Tahapan Perencanaan Program dan Kegiatan disesuaikan dengan RKP Desa Bengkel
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program Kegiatan Desa Bengkel Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
4. Terurainya Tingkat pencapaian keberhasilan, Permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya
5. Penyelenggaraan Pemerintah Desa Bengkel yang meliputi penyelenggaraan urusan dan kewenangan yang telah ada dan dilaksanakan secara rutin dari tahun ke tahun, telah terlaksana dengan baik hal ini terjadi melalui kerja sama dan hubungan yang harmonis antara Pemerintahash desa dengan Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta serta seluruh komponen masyarakat dalam kerangka Good Governace untuk mewujudkan Desa Bengkel yang Prima dalam Pelayanan menuju Masyarakat Desa Bengkel Sejahtera berlandaskan TRI HITA KARANA.



B. SARAN

1. Seiring dengan harapan dan kami menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Buleleng bisa mempercepat proses penyaluran dana Transfer ke Desa. Sehingga dapat mempercepat realisasi kegiatan pembangunan di Desa.
2. Demi Kelancaran Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kami dari Pemerintah Desa sangat antusias sekali jika Pemerintah Kabupaten atau Dinas terkait selalu berupaya meningkatkan Kapasitas Aparat Desa khususnya tentang Pengelola Keuangan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2020 kami buat sebagai bahan evaluasi Kinerja kami Pemerintah Desa Bengkel dan sebagai Laporan.

Bengkel, 18 Januari 2021

Perbekel Bengkel,

PUTU ARTANA. SE.,M.Si



LAMPIRAN I

REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK DESA BENGKEL

1. BANJAR DINAS BENGKEL

Jumlah KK	:	591	KK
Jumlah Laki-laki	:	1.198	Jiwa
Jumlah Perempuan	:	1.182	Jiwa
Jumlah Keseluruhan	:	2.380	Jiwa

2. BANJAR DINAS BUKIT TELU

Jumlah KK	:	513	KK
Jumlah Laki-laki	:	1.039	Jiwa
Jumlah Perempuan	:	1.069	Jiwa
Jumlah Keseluruhan	:	2.108	Jiwa

JUMLAH PENDUDUK DESA BENGKEL

Jumlah KK	:	1.105	KK
Jumlah Laki-laki	:	2.238	Jiwa
Jumlah Perempuan	:	2.252	Jiwa
Jumlah Keseluruhan	:	4.490	Jiwa



LAMPIRAN II

**RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA (LPPD) :**

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya /Jumlah
1	Peraturan Perundang-undangan	a.Peraturan Desa b.Peraturan bersama Perbekel c.Peraturan Perbekel d.Keputusan Perbekel	5 buah - 12 buah -
2	Kependudukan	a.Jumlah Penduduk 1)Laki-laki 2)Perempuan 3)Jumlah Kepala Keluarga 4)Jumlah Anggota Keluarga 5)Jumlah Jiwa b.Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan 1)Pendidikan Umum 2)Pendidikan Khusus c.Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian 1)PNS 2)TNI 3)Swasta	2.238 jiwa 2.252 jiwa 1.105 KK 3.385 jiwa 4.490 jiwa 29 orang 20 orang 2 orang 449 orang
3	Pertanahan	a.Status Tanah 1)Sertifikat Hak Milik 2)Sertifikat Hak Guna Usaha	- -



		3)Sertifikat Hak Pakai b.Luas Tanah 1)Bersertifikat 2)Belum Bersertifikat 3)Tanah Kas Desa c.Peruntukan 1)Jalan 2)Tanah Ladang 3)Bangunan Umum 4)Perumahan 5)Ruang Fasilitas Umum d.Tanah Yang Belum Dikelola 1)Hutan 2)Rawa-rawa	- ± Ha ± Ha ± Ha ± Km2 ± 446 Ha ± Ha ±152 Ha ± Ha - -
4	Manajemen Pemerintahan	a.Jumlah Aparat Pemerintahan Desa 1)PNS 2)Non PNS b.Jumlah Anggota BPD c.Musyawah Desa d.Musrenbangdes e.Musyawah BPD	- 10 orang 5 orang 3 kali 1 kali 12 kali
5	Ketentraman dan Ketertiban	a.Pembinaan Linmas 1)Jumlah Anggota 2)Alat Pemadam Kebakaran 3)Jumlah Linmas Terlatih b.Ketentraman dan Ketertiban 1)Jumlah Kejadian Kriminal 2)Jumlah Bencana Alam 3)Jumlah Operasi Penertiban 4)Jumlah Pos Keamanan 5)Jumlah Kecelakaan Remaja	31 orang - 31 orang - - - 5 pos -



6	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan 1) Rt/Rw - Ada/Tidak 2) PKK - Ada/Tidak 3) Karang Taruna - Ada/Tidak 4) Pos Pelayanan Terpadu - Ada/Tidak 5) LPM - Ada/Tidak b. Lembaga Kemasyarakatan Membantu Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat - Ya/Tidak c. Lembaga Kemasyarakatan sebagai Wadah Partisipasi Masyarakat dan sebagai Mitra Pemerintah Desa Ya/Tidak d. Lembaga Kemasyarakatan diikutsertakan dalam Pelaksanaan Program Sektor dan Program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak e. Lembaga Adat - Ada/Tidak f. Lembaga Adat dibentuk dengan Peraturan Desa terpisah dengan Lembaga Kemasyarakatan - Ya/Tidak	Tidak Ada Ada Ada Ada Ya Ya Ya Ada Ya
---	----------------------------------	--	--

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya /Jumlah
1	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km) b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	8,2 KM



		c.Jalan Provinsi (Km) d.Jalan Negara (Km) e.Jembatan (buah) f.Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	- - 1 Buah Ada
2	Pembangunan Pendidikan	a.Tempat Pendidikan Umum 1)Kelompok Bermain (Jumlah) 2)Taman Kanak-Kanak (Jumlah) 3)Sekolah Dasar (Jumlah) 4)Sekolah Menengah (Jumlah) 5)Akademi (Jumlah) 6)Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah) b.Tempat Pendidikan Khusus 1)Pendidikan Pesantren (Jumlah) 2)Madrasah (Jumlah) 3)Sekolah Luar Biasa (Jumlah) 4)Balai Latihan Kerja (Jumlah) 5)Kursus-kursus (Jumlah)	- 1 Unit 3 Unit - - - - - - - -
3	Pembangunan Kesehatan	a.Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah) b.Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah) c.Rumah Sakit Kusta (Jumlah) d.Rumah Sakit Mata (Jumlah) e.Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) f.Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) g.Rumah Bidan (Jumlah) h.Puskesmas (Jumlah) i.Apotek (Jumlah)	- - - - - - - - 1 Unit -
4	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a.Sarana Olah Raga 1)Lapangan Umum (Jumlah) 2)Lapangan Khusus (Jumlah) b.Sarana Kesenian/Kebudayaan	- -



		1)Gelanggang Remaja (Jumlah) 2)Gedung Kesenian (Jumlah) 3)Gedung Teater (Jumlah) 4)Gedung Bioskop (Jumlah) c.Sarana Sosial 1)Panti Asuhan (Jumlah) 2)Panti Pijat Tuna Netra (Jumlah) 3)Panti Wordo (Jumlah) 4)Panti Jompo (Jumlah) d.Sarana Komunikasi 1)Radio Komunitas (Jumlah) 2)Papan Pengumuman (Jumlah)	- - - - - - - - - -
5	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a.Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah) b.Industri Besar (Jumlah) c.Industri Sedang (Jumlah) d.Industri Rumah Tangga (Jumlah) e.Tempat Rekreasi (Jumlah) f.Hotel (Jumlah) g.Restoran/Rumah Makan (Jumlah) h.Saluran Irigasi(Jumlah)	- - 1 Unit 6 Unit 1 Unit - - 1 Unit

c. Bidang Kemasyarakatan

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya /Jumlah
1	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a.Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa 1)Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berapa Kali)	-



		2)Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Berapa Kali) 3)Peraturan Menteri Mengenai Desa (Berapa Kali) b.Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah 1)Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Desa (Berapa Kali) 2)Sosialisasi Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Desa (Berapa Kali) c.Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa 1)Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa Kali) 2)Sosialisasi Peraturan Kepala Desa (Berapa Kali) 3)Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	- - - - 2 kali 3 kali -
2	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a.Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali) b.Masyarakat Menyampaikan Informasi Kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak) c.Masyarakat Memperoleh Informasi dan Pelayanan yang adil (Ya/Tidak) d.Masyarakat mendapat perlindungan dari gangguan Ketentraman dan Ketertiban (Ya/Tidak) e.Masyarakat Berpartisipasi dalam berbagai Kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	2 kali 10 kali Ya Ya Ya
3	Sosial Budaya Masyarakat	a.Sosialisasi Mengenai Kerukunan Hidup Beragama (Berapa Kali) b.Sosialisasi mengenai Pengembangan Olah Raga dan Kesenian (Berapa Kali)	- 3 kali



		c.Sosialisasi mengenai Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Berapa Kali)	2 kali
		d.Sosialisasi mengenai Lingkungan Hidup (Berapa Kali)	12 kali
		e.Sosialisasi mengenai Bahaya Narkoba dan Kriminal (Berapa Kali)	9 kali
		f.Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	3 kali
4	Sosial Keagamaan	a.Majelis Taklim (Jumlah) b.Majelis Gereja (Jumlah) c.Majelis Budha (Jumlah) d.Majelis Hindu (Jumlah) e.Remaja Masjid (Jumlah) f.Remaja Gereja (Jumlah) g.Remaja Budha (Jumlah) h.Remaja Hindu (Jumlah)	- - - - - - - -
5	Ketenagakerjaan	a.Penyalar Pembantu Rumah Tangga (Jumlah) b.Penampung Pekerja ke Luar Negeri (Jumlah)	- -

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya /Jumlah
1	Sosialisasi dan Motivasi Masyarakat	a.Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali) b.Bidang Ekonomi (Berapa Kali) c.Bidang Politik (Berapa Kali) d.Bidang Lingkungan Hidup (Berapa Kali)	- - - 11 kali



2	Pemberdayaan Masyarakat	a.Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali) b.Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali) c.Pemberdayaan Olah Raga (Berapa Kali) d.Pemberdayaan Karang Taruna (Berapa Kali)	12 kali 2 kali 2 kegiatan 1 kali
3	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a.Bidang Pendidikan (Berapa Kali) b.Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	- 12



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN DAFTAR ISI

HALAMAN KATA PENGANTAR

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan Penyusunan Laporan
- C. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- D. Strategi dan Kebijakan

BAB II: PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA DAN PELAKSANAANNYA

- A. Program Kerja dan Pelaksanaan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- B. Program Kerja dan Pelaksanaan Bidang Pembangunan.
- C. Program Kerja dan Pelaksanaan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- D. Program Kerja dan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

BAB III : PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA

- A. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- B. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- C. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa:
 - 1. Pendapatan Desa
 - 2. Belanja Desa
 - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan



- b) Bidang Pembangunan
 - c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - e) Bidang Tak Terduga
 - f) Surplus/Defisit
3. Pembiayaan Desa
- a) Penerimaan Pembiayaan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan
 - c) Selisih Pembiayaan
4. SILPA Akhir Tahun

BAB IV : KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- B. Bidang Pembangunan.
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan Laporan
- B. Saran

Lampiran :

- 1. Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa
- 2. Rincian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Bengkel Tahun Anggaran 2020 dapat kami selesaikan tepat waktu. Dokumen LPPD ini disusun untuk disampaikan kepada Bupati Buleleng dan kepada masyarakat dalam bentuk Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa media luar uang (baliho).

LPPD pada dasarnya merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan desa selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Desa Bengkel Tahun 2020. LPPD Desa Bengkel tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahun ke-1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2020-2025

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kami akan berupaya untuk memperbaiki, melengkapi dan menyempurnakan laporan ini menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang.

Demikian kami sampaikan dan dengan disertai tekad dan niat yang luhur dari semua pihak, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa Bengkel pada tahun-tahun mendatang dapat lebih optimal dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.